

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah padat di Indonesia dan merupakan pintu gerbang utama menuju pusat Jawa, dimana secara geografis tempat ini berada. Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan di Jawa dan juga merupakan kota pelajar. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi ini dibagi menjadi 5 daerah tingkat II, Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas Yogyakarta sekitar 3.186 km² dengan total penduduk 3.226.443. Provinsi ini terkenal sebagai kota kebudayaan dan pendidikan dan merupakan daerah tujuan wisata.

Meskipun provinsi DIY mempunyai wilayah yang relative kecil, namun kaya akan daya tarik wisata. Pengunjung dapat menemukan berbagai macam hasil seni dan pertunjukan kesenian yang sangat menarik dan menakjubkan. Sebagai pusat seni dan budaya di Jawa, terdapat beberapa macam daya tarik wisata di Yogyakarta.

Selain itu Yogyakarta dipandang sebagai kota wisata yang memiliki kegiatan multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sector pariwisata Yogyakarta menyangkut aspek social, budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut berjalan dengan tercantumnya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan

Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Yogyakarta serta memupuk rasa cinta pada daerah dan mempererat persahabatan.¹

Persaingan yang makin meluas di dalam negeri telah diawali dengan kesanggupan untuk bersaing secara bebas. Pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dengan mengangkat ekonomi rakyat. Pariwisata sering dipersepsikan sebagai wahana untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya perolehan devisa sehingga perkembangannya lebih bersifat ekonomi-sentris dan berorientasi pada pertumbuhan. Karena jumlah perolehan ditentukan oleh jumlah kunjungan, pengeluaran, dan lama kunjungan wisatawan ke Negara tujuan.

Pembangunan disektor pariwisata ini akan melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan lapisan atas hingga lapisan bawah. Baik kalangan pemerintah, swasta, maupun kalangan masyarakat biasa, diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata, partisipasi masyarakat sekitar objek pariwisata dapat berupa partisipasi langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Partisipasi langsung berupa pemanfaatan peluang pasar dalam bentuk usaha-usaha yang terkait dengan kegiatan pemasaran penunjang pariwisata. Sehingga

¹ *Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*

pengembangan objek pariwisata dapat memberikan penghasilan terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian akan dapat meningkatkan pendapatannya.

Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa pemeliharaan situasi dan kondisi objek wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan, sehingga dapat mendorong wisatawan untuk berkunjung kelokasi tersebut dan tinggal lebih lama, sehingga dengan demikian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat membuka lapangan kerja baru berupa pelayanan terhadap kebutuhan wisatawan selama tinggal pada obyek wisata tersebut.

Keberhasilan pembangunan sector pariwisata akan turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional, karena pembangunan sector pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan lainnya. Pembangunan kepariwisataan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional, pembangunan pariwisata dalam Repelita VI, sebagai pelaksanaan amanat GBHN 1993.

Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan pembangunan pariwisata nasional sebagai sector pembangunan yang dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperkenalkan alam dan nilai-nilai budaya bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya

kebudayaan nasional, serta menjaga lingkungan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan Nasional.

Pariwisata yang kita kenal sekarang merupakan suatu fenomena yang bukan relatif baru, dimana sejak pertengahan abad 19, pariwisata sebagai salah satu produk dari Revolusi Industri. Namun demikian, kegiatan wisata pada dasarnya telah dilakukan manusia sejak lama, yakni ketika pariwisata dianggap sebagai suatu aktivitas yang mulai tumbuh dan berkembang seiring dan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan manusia atau paling tidak setelah manusia itu mengenal kebudayaan. Sedangkan pariwisata sebagai suatu ilmu, baru mulai berkembang setelah Perang Dunia I sebagai akibat perubahan struktural yang berdasarkan campur tangan pemerintah dalam bidang kehidupan dan bertambah ramainya arus wisatawan, mendorong orang untuk mempelajari dan meneliti secara ilmiah baik faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pariwisata maupun faktor-faktor yang menghambatnya. 2

Dalam hal ini, Yogyakarta memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan dunia internasional, baik dengan negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasional.

Saat ini dengan pesatnya perkembangan teknologi, telah memicu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh

2 Politik.kompasiana.com/2012/03/03/perkembangan-politik-luar-negeri-indonesia-439864.html

Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional.³

Dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan keputusan yang mengatur jalannya hubungan dan kerjasama luar negeri telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kota dan kabupaten untuk melakukan hubungan luar negeri atau kerjasama internasional terhadap mitra yang ada di luar negeri. Hal ini tentu ditujukan sebagai pelengkap dalam pembangunan daerah. Dengan adanya peraturan-peraturan ini memunculkan pemerintahan daerah baik tingkat kota, kabupaten dan provinsi sebagai actor baru dalam hubungan internasional.

Apalagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga setiap daerah harus mampu untuk memanfaatkan segala potensi daerahnya, sehingga nantinya untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pengelolaan potensi daerah sendiri dapat dilakukan di Indonesia yang sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan kaya akan budayanya, factor tersebut sangat berpotensi dibidang pariwisata untuk dapat

³ Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

dikembangkan. Selain itu sector pariwisata merupakan komoditi andalan disamping migas sebagai komoditi pendukung pembangunan nasional. 4

Seiring berkembangnya pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Sejak saat itu beberapa negara yang ada di dunia ini mulai menaruh perhatian terhadap kehidupan dan perkembangan pariwisata, karena telah didasari bahwa pariwisata bukan saja merupakan aspek kebutuhan kehidupan manusia yang bersifat naluriah dan alamiah, melainkan juga merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh devisa dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. 5

Indonesia yang berada di konstelasi ekonomi Asia Timur dan Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus dapat memanfaatkan peluang dunia pariwisata. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangkitkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata. Industri pariwisata Indonesia hingga pertengahan tahun 1997 berkembang dengan pesat bahkan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah.

Hampir satu dekade Indonesia yang kaya akan obyek wisata alam dan wisata budaya, telah menikmati masa-masa keemasannya. Menurut perhitungan menggunakan metodologi dari World Tourism Organization (WTO) yaitu Neraca

4 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

5 http://www.academia.edu/7392264/MAKALAH_SEMINAR_KERJA_PRAKTEK

Satelit Pariwisata Nasional yang secara garis besar adalah pada tahun 2003 jumlah pendapatan dari kepariwisataan di Indonesia mencapai hampir Rp 125 trilyun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 7,25 juta orang. 6

Pada kenyataannya, sektor pariwisata ini juga telah mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya di daerah-daerah tujuan wisata yang telah berkembang seperti Kabupaten Sleman sebagai salah satu contohnya.

Pemerintah DIY, selaku pemerintah Daerah Tingkat I berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang terdapat di DIY. Dimana berbagai efek globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta liberalisme perdagangan yang memicu persaingan sangat ketat. Sebuah konsep pariwisata yang memperhatikan kesetaraan gender dan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan serta menjaga kenyamanan wisatawan menjadi prioritas program-program yang diusung oleh pemerintah DIY.

Budaya dan pariwisata merupakan aset bagi daerah, memberikan pendapatan yang tidak sedikit bahkan dibeberapa daerah di Indonesia, budaya dan pariwisata merupakan sumber utama pendapatan daerah. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengembangkan potensinya, termasuk didalamnya potensi kebudayaan dan kepariwisataannya. Pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat dalam Ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah menumbuhkan peluang bagi daerah untuk memanfaatkan

6 *Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005-2009*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

semaksimal mungkin potensi daerah masing-masing. Disamping itu juga menimbulkan tantangan yang tidak kecil bagi daerah, merupakan tanggung jawab penuh bagi daerah untuk memajukan daerahnya dalam berbagai bidang, baik itu yang berkaitan dengan perekonomian, pembangunan, social budaya maupun bidang kepariwisataannya.

Dengan demikian, daerah harus dapat mengembangkannya secara mandiri dan profesional, baik itu dengan memanfaatkan program kemitraan antar daerah (dalam negeri) maupun kerjasama internasional dengan beberapa negara atau kemitraan kota dengan suatu negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pariwisata merupakan komoditi yang dapat dikembangkan sebagai salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dan tidak selamanya pula sektor pariwisata selalu berjalan sesuai dengan harapan, travel warning yaitu adanya larangan dari beberapa negara untuk melakukan sejumlah perjalanan ke Indonesia dikarenakan standar keamanan penerbangan Indonesia masih termasuk dalam kategori rendah. Bahkan akhir-akhir ini yang menambah daftar buruknya industri pariwisata adalah banyak terjadi bencana alam yang dapat menjadi salah satu faktor menurunnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah. ⁷

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan

⁷ *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata DIY*

berkembang dengan baik. Bahkan Kepariwisata di Yogyakarta di beberapa kawasan dan obyek parirwisatanya telah terkenal hingga ke mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di Yogyakarta pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 bulan November-Desember mengalami penurunan wisatawan, disebabkan fenomena Letusan Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Sleman, sehingga tempat-tempat wisata yang ada di daerah Yogyakarta juga terpengaruh oleh erupsi Gunung Merapi yang membuat wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup drastis. Akan tetapi, pada tahun-tahun selanjutnya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan citra Yogyakarta, perlu adanya perbaikan di segala sektor yang berhubungan dengan industri pariwisata. Mengingat sebagian besar masyarakat Yogyakarta ataupun daerah sekitarnya juga menggantungkan kehidupan mereka di sektor pariwisata, baik itu usaha perhotelan, rumah makan sampai jasa pemandu wisata dan kerajinan.

Maka dari itu, diperlukan berbagai langkah strategis serta kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal pemerintah Yogyakarta baik ditingkat nasional (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional, dan bilateral) untuk bisa memulihkan kembali pariwisata di Yogyakarta. 8

8 *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata DIY*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Strategi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DIY dalam Rangka Meningkatkan Arus Kunjungan Wisatawan Asing 2010-2013?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerjasama Luar Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pariwisata
2. Untuk Mengetahui hubungan Provinsi DIY dengan pihak asing
3. Untuk mengetahui seberapa banyak arus kunjungan wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta 2010-2013

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai kerjasama luar negeri pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal agar dapat lebih mengerti baik sebagian maupun menyeluruh mengenai kerjasama luar negeri Pemerintah DIY guna melestarikan dan mengembangkan arus wisatawan asing tahun 2010-2013, serta berupaya meningkatkan kualitas di bidang pariwisata untuk masa yang akan datang.

2. Kemudian juga sebagai sumbangan informasi dalam usaha untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang pariwisata, khususnya yang berkenaan dengan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DIY dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing tahun 2010-2013.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab dan menjelaskan langkah-langkah Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DIY dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013, maka penulis akan menggunakan teori yang sesuai dengan pembahasan diatas. Adapun teori yang digunakan yakni sebagai berikut :

Teori Kerjasama Internasional

Menurut KJ. Holsti, mendefinisikan Kerjasama Internasional adalah sebagai berikut :

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama”⁹

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, maka semakin pelik pula permasalahan yang akan dihadapi setiap negara. Hal ini tanpa disadari

⁹ K.J Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*, Erlangga, Jakarta, 1998.

juga menyebabkan meningkatnya interaksi dan interdependensi antar negara dan antar bangsa, dan disisi yang lain meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Proses kerjasama itu tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat tidak terlepas dari hubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan social yang dinamis antar orang-perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara kelompok manusia dengan orang-perorangan. Dalam era globalisasi frekuensi interaksi yang terjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan lain sebagainya.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan tercermin dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern adalah Hubungan Internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antara Negara, menciptakan hubungan antar mereka yang saling menguntungkan dan efektivitas kerjasama itu dapat terjamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping

hubungan tersebut juga akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan semua sector masyarakat. 10

Dari pengertian diatas, kerjasama internasional sangat perlu dilakukan tidak hanya terbatas oleh Negara tetapi juga oleh semua sector masyarakat yang ada. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan melakukan kerjasama internasional telah dimulai sejak diberlakukannya UU tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 atau yang lebih dikenal sebagai UU otonomi daerah. 11 Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri ini tetap berlaku sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 12

Dalam rangka mengantisipasi, mengakomodasi perubahan pola hubungan luar negeri disamping sekaligus menyelaraskan arus global dan berbagai kepentingan nasional dalam setiap level of interest, Indonesia telah mengundang UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : “ Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan

10 Morgenthau, *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional*. New York, 1982 hal 86.

11 *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal 54.

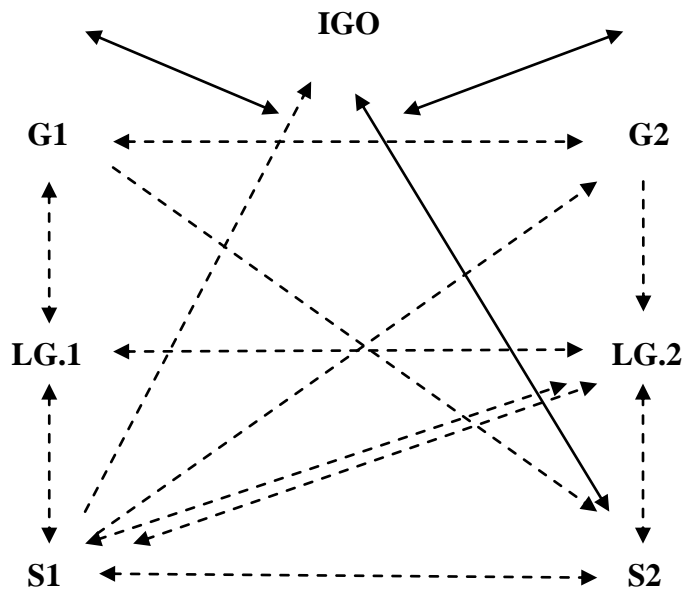
12 Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press Yogyakarta, 2013 hal 3.

usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.” 13

Dalam hal tersebut dapat digambarkan bahwa Pola Hubungan Internasional yakni, 14 :

Skema 1

Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional hal mana Local Government (Pemerintah Daerah) merupakan actor/pelaku “baru” hubungan Internasional



Pola Hubungan Lama/Klasik

———— Hubungan Dalam Negeri

----- Hubungan Transnasionalisme

G = Government = Pemerintah Pusat

LG = Local Government = Pemerintah Daerah

13 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

14 Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*, BIGRAF Publishing, 2001 hal 52

S = Society = Masyarakat (termasuk di dalamnya adalah Masyarakat Bisnis)

Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang penting pada proses penyempurnaan sistem otonomi daerah yang berkelanjutan yang telah pula membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri.

Dalam pelaksanaan kerja sama internasional oleh Pemda ini adalah bahwa Pemda Yogyakarta tersebut secara struktural berada dibawah Kementrian Dalam Negeri, sehingga dalam hal pengaturan kerja sama luar negeri ini pun dijumpai aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri antara lain Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemda dengan Pihak Asing, dan permendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemda dengan Badan Swasta Asing (BSA).

Melihat situasi diatas, maka penjelasan dari teori kerjasama internasionaal tersebut dapat diaplikasikan terkait dengan masalah yang muncul terhadap sejumlah sektor kehidupan di Yogyakarta yakni meningkatnya arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah DIY sepenuhnya merupakan tanggung jawab oleh Pemda setempat. Mengingat adanya otonomi daerah yang membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, yang menyebabkan Pemerintah DIY kemudian dengan segera melakukan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak (pusat, LSM, Dewan Kebudayaan) beserta dengan beberapa negara atau pihak asing melakukan

kerjasama guna merehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya terhadap sejumlah kawasan cagar budaya yang sekaligus juga merupakan obyek daya tarik wisatawan. Adapun kerjasama ini bersifat kerjasama teknik yang termasuk bantuan kemanusiaan dan kerjasama berupa hibah.

Oleh karena itu, dari serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan menggandeng beberapa negara guna merehabilitasi maka juga akan berpengaruh pada meningkatnya kembali kepercayaan wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke sejumlah obyek dan daya tarik wisata yang ada di Yogyakarta. Karena mengingat faktor keamanan dan kenyamanan salah satu penentu bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah atau negara tertentu.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka dapat ditarik hipotesa :

Bahwa Strategi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DIY dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013 yaitu :

1. Kerjasama pariwisata melalui perjanjian dengan pihak asing.
2. Melakukan Promosi pariwisata di di Luar Negeri
3. Kerjasama pelayanan jasa pariwisata dengan pihak asing.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar data yang dikumpulkan tetap relevan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dimana penulis hanya meneliti tentang pariwisata Yogyakarta. Dengan kata lain, penelitian hanya terbatas pada aspek pariwisata di lokasi penelitiannya saja yakni data-data yang tersedia di Dinas Pariwisata DIY. Penulis juga akan meneliti kerjasama luar negeri Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan arus wisatawan asing tahun 2010-2013. Yaitu pada tahun 2010 bulan November-Desember terjadi fenomena Letusan Gunung Merapi yang terjadi di Kabupaten Sleman, sedangkan tahun 2013 pengambilan data jumlah kunjungan wisatawan asing maupun nusantara yang berkunjung ke DIY.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian metode sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai obyek, sudut pandang terhadap obyek metode serta hasil-hasil pandangnya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis.

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang di ungkapkan oleh DR. Lexy J. Moleong, dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Adalah merupakan upaya pengumpulan data dari teori melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, kliping, koran, agenda dan hasil penelitian yang terdapat di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata DIY, yang tentunya memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai situs internet. 15

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan ditampilkan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I ini berisi Pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

15 *Ibid*, hal 116-117

BAB II ini berisi mengenai Fluktuasi naik turunnya wisatawan asing di Yogyakarta tahun 2010-2013. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai naik turunnya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta

BAB III ini berisi mengenai Strategi Pemerintah DIY dalam Meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013. Pada bagian bab III ini, penulis akan mendiskripsikan bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah DIY untuk meningkatkan wisatawan asing berkunjung ke obyek wisata yang ada di Yogyakarta.

BAB IV berisikan Kesimpulan, berisikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian. Dan kemudian saran yang sekiranya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan pariwisata di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya. Serta dapat mengembangkan kerjasama luar negeri Pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing 2010-2013.